



# Strategi Dinas Koperasi dalam Pembinaan Kelembagaan Koperasi Mewujudkan Kemandirian Ekonomi

Sulis Dewi Astutik\*, Anggulyah Rizki A

Universitas Islam Raden Rahmat Malang

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan strategi pembinaan kelembagaan koperasi oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang dalam mendorong kemandirian ekonomi anggota. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, lalu dianalisis dengan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil menunjukkan tiga strategi utama: pelatihan manajerial untuk meningkatkan profesionalisme, pendampingan digitalisasi guna memperkuat efisiensi dan transparansi, serta monitoring dan evaluasi berkala untuk menjamin keberlanjutan program. Strategi ini efektif memperbaiki tata kelola dan meningkatkan partisipasi anggota, meski terkendala akses internet dan kapasitas SDM di daerah pedesaan. Penelitian ini menegaskan pentingnya pembinaan adaptif dan berbasis teknologi bagi koperasi yang mandiri dan modern.

**Kata kunci:** Koperasi, Pembinaan Kelembagaan, Digitalisasi, Strategi, Kemandirian Ekonomi

DOI:

<https://doi.org/10.47134/jampk.v3i1.874>

\*Correspondence: Sulis Dewi Astutik

Email: [ao9966575@gmail.com](mailto:ao9966575@gmail.com)

Received: 14-07-2025

Accepted: 21-08-2025

Published: 09-09-2025



**Copyright:** © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** This study describes the cooperative institutional development strategies implemented by the Department of Cooperatives and Micro Enterprises of Malang Regency to promote members' economic independence. Using a descriptive qualitative method, data were collected through interviews, observations, and documentation, then analyzed using Miles and Huberman's interactive model. Findings indicate three main strategies: managerial training to enhance professionalism, digitalization assistance to improve efficiency and transparency, and regular monitoring and evaluation to ensure sustainability. These strategies effectively improved governance and member participation, although challenges remain in rural cooperatives with limited internet access and human resource capacity. The study highlights the need for adaptive, technology-based development for modern and independent cooperatives.

**Keywords:** Cooperatives, Institutional Development, Digitalization, Strategy, Economic Independence

## Pendahuluan

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang menghadapi tantangan serius terkait kondisi kelembagaan koperasi yang belum optimal, di mana banyak koperasi masih kesulitan mengakses modal, digitalisasi rendah, serta kelembagaan yang kurang profesional sehingga belum mampu mendukung kemandirian ekonomi anggota (Penelitian UMM, 2024). Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa hingga tahun 2020 jumlah koperasi di Kabupaten Malang cukup besar hingga 1.334, tetapi sebagian besar belum bergerak maksimal dalam pembiayaan dan pengembangan UMKM (BPS Kabupaten Malang, 2020). Situasi ini semakin mengkhawatirkan mengingat peran strategis koperasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan mengurangi kemiskinan, tetapi banyak

koperasi belum sepenuhnya mandiri dan profesional (Manzilati et al., 2024). Oleh karena itu, urgensi penelitian ini sangat tinggi karena perlu dirancang strategi pembinaan kelembagaan yang adaptif, digital, dan relevan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang agar koperasi dapat bertransformasi menjadi pilar ekonomi rakyat yang tangguh dan mandiri.

Pembinaan kelembagaan koperasi oleh Dinas menjadi urgensi karena banyak koperasi tidak mampu mengelola organisasi secara profesional dan akuntabel, sehingga dibutuhkan strategi pembinaan yang terarah dan berkelanjutan (Rukmana & Mustofa, 2022). Sayangnya, kajian akademik yang secara spesifik meneliti strategi kelembagaan koperasi oleh Dinas Koperasi Kabupaten Malang masih sangat terbatas, sehingga terdapat kesenjangan dalam aspek evaluasi kebijakan dan efektivitas program yang dijalankan (Susyanti & Pardiman, 2022). Beberapa studi sebelumnya memang menyoroiti pembinaan koperasi di wilayah lain, seperti di Kota Jambi atau Kabupaten Jombang, namun belum ada fokus yang komprehensif pada wilayah Malang, baik dari segi pendekatan strategi maupun hasilnya terhadap kemandirian ekonomi anggota (Hasanah & Suhma, 2025).

Literatur terbaru menunjukkan bahwa pembinaan kelembagaan yang efektif melibatkan aspek pelatihan manajemen, pendampingan berkelanjutan, serta digitalisasi manajemen koperasi sebagai respons terhadap tantangan zaman (Wibowo et al., 2024). Studi oleh Budiyanto & Effendy (2020) di Jombang, misalnya, menyimpulkan bahwa keberhasilan koperasi dalam memperkuat ekonomi anggotanya sangat bergantung pada strategi pembinaan yang dilakukan oleh Dinas secara aktif, sistematis, dan berbasis kebutuhan lapangan. Selain itu, pendekatan pembinaan yang kolaboratif antara Dinas dan pihak swasta melalui program kemitraan digital juga terbukti meningkatkan kapasitas kelembagaan koperasi (Priyono, n.d.).

Kesenjangan literatur ini memberikan dasar penting bagi perlunya penelitian mendalam terkait strategi pembinaan kelembagaan koperasi oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang, yang hingga kini belum banyak disentuh dalam kerangka empiris dan kebijakan lokal (Santya & Kustini, 2025). Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya memiliki nilai teoretis dalam memperkaya wacana akademik tentang pembangunan kelembagaan koperasi, tetapi juga nilai praktis yang tinggi dalam memberikan masukan bagi penyusunan kebijakan Dinas secara lebih adaptif dan berbasis hasil. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi pembinaan kelembagaan koperasi oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang juga untuk mengevaluasi efektivitas implementasi strategi tersebut dalam mendorong kemandirian ekonomi anggota koperasi serta memberikan rekomendasi perbaikan strategi berbasis data dan praktik terbaik.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam strategi pembinaan kelembagaan koperasi oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang dalam mewujudkan kemandirian ekonomi anggota koperasi. Informan penelitian dipilih secara purposive dan terdiri dari pejabat dinas, pengurus koperasi, serta anggota koperasi yang terlibat aktif dalam program pembinaan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan

studi dokumentasi, dengan peneliti sebagai instrumen utama yang dibantu pedoman wawancara dan catatan lapangan. Validitas data diuji dengan triangulasi sumber dan metode, serta teknik konfirmasi melalui member checking. Data dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, guna menemukan pola dan makna strategis dari proses pembinaan kelembagaan koperasi secara kontekstual dan sistematis.

### Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Malang dengan fokus pada aktivitas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang dalam membina kelembagaan koperasi. Waktu pengumpulan data dilakukan dalam waktu 2 bulan. Teknik pengumpulan data melibatkan wawancara mendalam dengan pejabat dinas, pengurus koperasi, serta anggota koperasi observasi kegiatan pembinaan; serta telaah dokumen dinas dan laporan koperasi yang dibina.

#### Strategi Pembinaan Kelembagaan oleh Dinas Koperasi

Dari data lapangan, ditemukan bahwa Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang menerapkan tiga strategi utama dalam pembinaan kelembagaan koperasi:

**Tabel 1.** Strategi Pembinaan Kelembagaan oleh Dinas Koperasi Kabupaten Malang

Strategi Pembinaan	Kegiatan Terkait	Tujuan
Pelatihan managerial	Workshop kelembagaan pelatihan	Meningkatkan profesionalisme pengurus
Pendampingan digitalisasi	Sosialisasi dan pelatihan penggunaan aplikasi koperasi digital seperti Elkopra	Meningkatkan efisiensi dan transparansi
Monitoring & evaluasi ( <i>money</i> )	Audit kelembagaan, forum evaluasi triwulanan	Menjamin keberlanjutan dan efektivitas program

Sumber: Data penelitian yang diolah peneliti (2025)

Dari tabel 1 diatas secara umum, koperasi yang mendapatkan pendampingan intensif menunjukkan peningkatan dalam hal tata kelola organisasi, kemampuan manajerial, serta keterbukaan informasi. Salah satu koperasi binaan, misalnya, mampu menyusun Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) secara legal dan menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) secara transparan pasca pembinaan.

Wawancara dengan pengurus koperasi mengungkapkan bahwa pembinaan yang dilakukan oleh dinas sangat membantu dalam aspek kepatuhan hukum dan peningkatan pengetahuan manajerial. Namun, tantangan masih dirasakan dalam hal adopsi digitalisasi, terutama di koperasi-koperasi berbasis pedesaan yang minim akses internet dan kapasitas SDM.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang menerapkan tiga strategi utama dalam pembinaan kelembagaan koperasi, yaitu pelatihan manajerial, pendampingan digitalisasi, serta monitoring dan evaluasi secara berkala. Strategi tersebut memiliki relevansi kuat dengan teori kelembagaan

koperasi yang dikemukakan oleh Avianto et al (2023) yang menekankan pentingnya struktur formal dan tata kelola koperasi sebagai mekanisme dalam mencapai tujuan ekonomi anggota. Teori ini menempatkan kelembagaan yang kuat sebagai prasyarat terciptanya kemandirian ekonomi anggota koperasi. Pendekatan yang dilakukan Dinas Koperasi Malang sejalan dengan konsep penguatan kapasitas organisasi sebagaimana diuraikan oleh Atbar (2024), yaitu membangun kompetensi sumber daya manusia (SDM) dan mengembangkan struktur manajerial yang adaptif terhadap perubahan lingkungan, terutama melalui adopsi teknologi digital. Hal ini tercermin dari implementasi pelatihan berbasis studi kasus dan penerapan sistem digital untuk mendukung tata kelola koperasi (Sulistia & Suparman, 2019). Strategi pelatihan dan pendampingan oleh Dinas Koperasi Malang membuktikan pentingnya pendekatan sistemik sebagaimana dijelaskan Dewi (2023), di mana pelatihan berbasis studi kasus dan manajemen koperasi meningkatkan kualitas kelembagaan.

Jika dibandingkan dengan temuan penelitian di daerah lain, strategi pembinaan yang dilakukan di Kabupaten Malang memiliki kesamaan dan perbedaan signifikan. Penelitian Arsinta & Widiyanto (2018) di Kota Semarang menunjukkan bahwa pembinaan kelembagaan koperasi oleh Dinas setempat juga menitikberatkan pada penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan manajerial. Namun, perbedaan utama terletak pada fokus digitalisasi. Di Kabupaten Malang, pendampingan digitalisasi menjadi salah satu pilar utama pembinaan, sedangkan di Kota Semarang, digitalisasi belum menjadi prioritas strategis utama. Hal serupa juga ditemukan dalam studi Hasanah & Suhma (2025) di Kabupaten Jember, di mana pembinaan lebih diarahkan pada aspek legalitas dan administrasi koperasi, tanpa penekanan yang signifikan pada penggunaan teknologi digital. Perbedaan ini menunjukkan bahwa strategi di Kabupaten Malang relatif lebih progresif dalam merespons tantangan zaman, khususnya transformasi digital di sektor koperasi.

Digitalisasi koperasi menjadi isu penting yang memengaruhi kinerja dan keberlanjutan kelembagaan. (Ifa, 2024) menegaskan bahwa digitalisasi mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja keuangan koperasi, terutama melalui efisiensi proses administrasi, transparansi laporan keuangan, dan kemudahan akses bagi anggota. (Fadhillah, 2025) juga menemukan bahwa pelatihan transformasi digital mampu memodernisasi tata kelola koperasi, khususnya pada koperasi sektor pangan di Jawa Barat. Hal ini relevan dengan kondisi di Kabupaten Malang, di mana pendampingan digitalisasi dilakukan melalui sosialisasi dan pelatihan penggunaan aplikasi koperasi digital seperti Elkopra. Namun demikian, tantangan signifikan masih dihadapi oleh koperasi di wilayah pedesaan yang memiliki keterbatasan akses internet dan rendahnya kapasitas SDM dalam mengoperasikan teknologi baru. Kendala ini sejalan dengan temuan (Setiawan et al., 2023) yang menunjukkan bahwa meskipun digitalisasi membawa manfaat besar, keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur dan kualitas SDM di tingkat koperasi.

Selain digitalisasi, pembinaan tata kelola koperasi menjadi faktor penting dalam mendorong kemandirian ekonomi anggota. (Ait Novatiani et al., 2023) membuktikan

bahwa tata kelola yang baik berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan koperasi. Dalam konteks penelitian ini, pelatihan manajerial yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Malang berperan dalam meningkatkan kemampuan pengurus dalam menyusun Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) secara legal, menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dengan transparan, serta memperbaiki sistem administrasi. Peningkatan profesionalisme ini berdampak langsung pada kepercayaan anggota, yang pada gilirannya memudahkan koperasi untuk mengakses sumber permodalan dan memperluas jaringan usaha. Dengan demikian, strategi pembinaan yang mengintegrasikan penguatan tata kelola dan pendampingan digital menjadi kombinasi yang efektif dalam mendorong kemandirian koperasi.

Pendekatan *capacity building* yang diadopsi oleh Dinas Koperasi Malang memiliki kesamaan dengan konsep yang dikemukakan oleh (Ruswandi et al., 2021), yang menyatakan bahwa pembinaan koperasi perlu dilakukan secara berkelanjutan dan mencakup pengembangan SDM, penguatan struktur organisasi, serta reformasi kelembagaan. Dalam praktiknya, Dinas Koperasi Malang tidak hanya memberikan pelatihan formal, tetapi juga melakukan pendampingan secara langsung melalui monitoring dan evaluasi berkala. Strategi ini memastikan bahwa perubahan yang diharapkan tidak hanya terjadi di permukaan, tetapi juga tertanam dalam budaya organisasi koperasi. Model pembinaan seperti ini juga sejalan dengan gagasan Herawan et al (2024) tentang pentingnya kolaborasi antara koperasi, pemerintah, dan pihak swasta, termasuk melalui inisiatif *crowdfunding* koperasi untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Jika dilihat dari perspektif teori organisasi, strategi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Malang menggabungkan pendekatan *top-down* dan *bottom-up*. Dari sisi *top-down*, dinas menetapkan kebijakan, memberikan pelatihan, dan menyediakan fasilitas pendukung, sedangkan dari sisi *bottom-up*, pengurus dan anggota koperasi didorong untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembinaan. Kolaborasi ini sesuai dengan prinsip-prinsip pemberdayaan yang dikemukakan oleh (Anwar et al., 2024), yang menekankan pentingnya partisipasi anggota dalam setiap tahap pengambilan keputusan agar strategi yang diterapkan relevan dengan kebutuhan nyata di lapangan.

Meskipun strategi pembinaan kelembagaan koperasi di Kabupaten Malang telah menunjukkan hasil positif, penelitian ini juga mengungkap adanya keterbatasan dalam pemerataan kualitas pembinaan antarwilayah. Koperasi di wilayah dengan infrastruktur memadai cenderung lebih cepat mengadopsi digitalisasi dibandingkan koperasi di wilayah pedesaan yang akses internetnya terbatas. Hal ini memperkuat temuan (Rahmawati & Wahyuningsih, 2022) yang menyoroti bahwa pembinaan yang berhasil membutuhkan dukungan fasilitas fisik dan non-fisik yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan afirmatif yang memastikan semua koperasi, termasuk yang berada di daerah terpencil, mendapatkan akses pembinaan dan fasilitas yang setara.

Dalam perspektif pengembangan organisasi, strategi dinas mencerminkan prinsip-prinsip penguatan kompetensi organisasi sebagaimana dijabarkan oleh Atbar (2024), yaitu

mengembangkan kapasitas SDM dan struktur manajerial yang adaptif terhadap perubahan, terutama melalui adopsi teknologi digital.

Temuan menunjukkan bahwa strategi pembinaan kelembagaan oleh Dinas Koperasi Kabupaten Malang efektif dalam memperkuat struktur koperasi dan menumbuhkan semangat profesionalisme pengelolaan. Hal ini menjawab tujuan penelitian terkait efektivitas strategi pembinaan dalam mendorong kemandirian ekonomi koperasi, meskipun secara implementatif masih ada tantangan dalam pemerataan kualitas pembinaan antar wilayah.

Penelitian ini menguatkan hasil studi Budiyanto & Effendy (2020) yang menekankan pentingnya pendampingan berkelanjutan oleh pemerintah dalam keberhasilan koperasi. Di sisi lain, penelitian ini juga memberikan pembaruan dibandingkan studi di Jambi atau Jombang dengan memasukkan aspek transformasi digital sebagai elemen pembinaan, sebagaimana juga didukung oleh penelitian Nurjawahir et al (2022) dan Wahyudin (2024).

Secara teoritis, temuan memperkuat model kolaboratif antara pemerintah dan koperasi dalam pengembangan kelembagaan koperasi berbasis nilai-nilai partisipatif dan profesionalisme. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi Dinas Koperasi di daerah lain untuk mengembangkan strategi pembinaan yang lebih adaptif, digital, dan berkelanjutan. Sementara itu, secara teoretis, penelitian ini memperkaya literatur tentang pengembangan kelembagaan koperasi dengan menggabungkan perspektif tata kelola, digitalisasi, dan *capacity building*. Mengacu pada temuan ini, saran bagi penelitian selanjutnya adalah melakukan studi kuantitatif atau metode campuran (*mixed methods*) untuk mengukur dampak pembinaan secara statistik terhadap indikator kinerja koperasi, sehingga hasilnya dapat digeneralisasikan ke konteks yang lebih luas.

Penelitian ini terbatas pada pendekatan kualitatif dan ruang lingkup wilayah Kabupaten Malang, sehingga generalisasi hasil ke wilayah lain perlu dilakukan dengan hati-hati. Selain itu, tidak semua koperasi yang dibina memiliki dokumentasi yang lengkap, sehingga menghambat triangulasi data secara optimal.

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, strategi pembinaan kelembagaan koperasi oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang berfokus pada pelatihan manajerial, pendampingan digitalisasi, serta monitoring dan evaluasi berkala yang terbukti efektif meningkatkan profesionalisme pengurus, efisiensi tata kelola, dan transparansi operasional koperasi. Implikasi penting dari temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembinaan tidak hanya ditentukan oleh intervensi teknis, tetapi juga oleh partisipasi aktif anggota koperasi serta dukungan infrastruktur yang memadai, sehingga strategi berbasis teknologi dan kolaboratif dapat memperkuat peran koperasi sebagai pilar ekonomi rakyat. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan dilakukan kajian kuantitatif atau metode campuran guna mengukur dampak pembinaan terhadap kinerja koperasi secara lebih luas serta mengeksplorasi peran kemitraan dengan sektor swasta maupun lembaga keuangan digital. Secara praktis, rekomendasi bagi Dinas Koperasi adalah memperluas digitalisasi hingga wilayah pedesaan dengan dukungan peningkatan kapasitas SDM dan infrastruktur, serta

mendorong kebijakan afirmatif dan kolaborasi lintas sektor agar koperasi dapat bertransformasi menjadi lembaga yang modern, profesional, dan mandiri.

### Referensi

- Ait Novatiani, R., Novianto, R. A., Christina, V., Asikin, B., & Sarumpet, T. L. (2023). Pengaruh Tata Kelola Koperasi Terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal Ekuilnomi*, 5(2), 285–291.
- Anwar, K., Muhammad, A., & Anti, A. R. (2024). Optimalisasi Koperasi Sektor Riil di Indonesia: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Koperasi Indonesia (JKEKI)*, 1(01), 1–7.
- Arsinta, Y., & Widiyanto, W. (2018). Strategi Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Pada Dinas Koperasi Kota Semarang. *Economic Education Analysis Journal*, 7(1), 251–264.
- Atbar, S. (2024). Pengembangan Organisasi Berbasis Kompetensi (Sebuah Kajian Teori). *Papsel Journal Of Humanities And Policy*, 1(2), 112–124.
- Avianto, B. N., Noverita, N., Saribanon, N., Pangesti, B. W., Kifayah, H., Nuraeni, E., & Kamila, A. I. (2023). Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dalam upaya Pemberdayaan Anggota BMT Kota Depok. *Dedikasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 247–257.
- Budiyanto, A., & Effendy, A. A. (2020). Analisa kebijakan pemerintah Kota Tangerang Selatan terhadap pemberdayaan Koperasi dan UMKM dan dampaknya terhadap pemerataan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Mandiri: Ilmu Pengetahuan, Seni, Dan Teknologi*, 4(1), 80–93.
- Dewi, L. S. (2023). Pelatihan Manajemen Koperasi dan Kelembagaan Koperasi bagi Pengawas Koperasi di Kota Cimahi Propinsi Jawa Barat. *E-Coops-Day*, 4(1), 17–22.
- BPS. (2020). *Badan Pusat Statistik 2020*. Badan Pusat Statistik, Kabupaten Malang. Diakses dari <https://malangkab.bps.go.id/id/statistics-table/1/ODIzIzE=/jumlah-koperasi-aktif-menurut-kecamatan-di-kabupaten--malang--2018---2020.html>.
- Fadhillah, M. H. (2025). Pelatihan Transformasi Digital untuk Modernisasi Kelembagaan dan Tata Kelola Koperasi Sektor Pangan di Jawa Barat. *E-Coops-Day*, 6(1), 31–36.
- Hasanah, S. A., & Suhma, W. K. (2025). Upaya Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kabupaten Jember: Studi Kasus Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Jember. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(3), 612–618.
- Herawan, J. E., Susilo, Y. S., & Putranto, L. F. D. (2024). Indonesia Crowdfunding Cooperatives (IC Coop): Inisiatif Integrasi Koperasi Bagi Pemulihan Ekonomi Nasional

- Secara Kolektif. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship*, 14(1), 33–44.
- Ifa, K. R. (2024). Peran Digitalisasi Koperasi Terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Kinerja Keuangan di KSPPS BMT Alhikmah Semesta. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Koperasi Indonesia (JKEKI)*, 1(01).
- Manzilati, A., Efani, A., Kornitasari, Y., & Sari, M. (2024). Pengembangan Digitalisasi Koperasi Guna Mendorong Modernisasi Koperasi Mina Jaya di Sendang Biru, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang. *IHSAN: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT*, 6(2), 220–229.
- Nurjawahir, K., Safuan, S., & Alhabshy, M. A. (2022). Penerapan sistem kuelap dalam transformasi koperasi berbasis digital. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1(12), 3347–3354.
- Priyono, M. A. B. J. (n.d.). *PEMBERDAYAAN USAHA KECIL MENENGAH MANIK-MANIK KACA OLEH DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH KABUPATEN JOMBANG*.
- Rahmawati, A., & Wahyuningsih, R. S. H. (2022). Peningkatan Tata Kelola Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah BUEKA Walidah Mulia. *Berdikari: Jurnal Inovasi Dan Penerapan Ipteks*, 10(1), 28–38.
- Rukmana, S., & Mustofa, M. (2022). Optimalisasi Peranan Financial Technology (Fintech Sharia) Menuju Era Digitalisasi Koperasi:(Optimizing the Role of Financial Technology (FintechSharia) Towards the Cooperative Digitalization Era). *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1), 30–35.
- Ruswandi, W., Patandung, H., & Riswandi, R. (2021). Peningkatan Kinerja Koperasi Melalui Building Capacity Berbasis Pengembangan SDM, Penguatan Organisasi Dan Reformasi Kelembagaan Pada Masa Pandemic Covid-19. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 5(3), 1502–1514.
- Santya, V. M., & Kustini, K. (2025). Penguatan Peran Dinas Koperasi dalam Pengawasan untuk Meningkatkan Kinerja Koperasi di Kota Surabaya. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 5(2), 422–431.
- Setiawan, W. L., Tasrifah, E. A., Darmawan, R. F., Hendri, D. M., Rahayu, I. N. F., & Ardiansyah, M. D. (2023). Penguatan Kelembagaan Koperasi dan Digitalisasi Koperasi Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia "Angkasa" RRI Yogyakarta. *E-Coops-Day*, 4(2), 231–236.
- Sulistia, D. F., & Suparman, N. (2019). Peranan Pembinaan Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Jawa Barat Dalam Memajukan Perkoperasian Di Daerah. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 7(2), 58–70.

- 
- Susyanti, J., & Pardiman, P. (2022). Pengembangan Ekonomi Kreatif di Jawa Timur. *Jurnal Pusat Studi Jawa Timur*, 1(2).
- Setyaningrum, A. F. (2023). *Pengembangan Sektor UMKM Berbasis Digital untuk Peningkatan Perekonomian di Kabupaten Malang (Studi pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Malang). Diakses dari <https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/3281/>
- Wahyudin, W. (2024). Pelatihan Transformasi Digitalisasi Menuju Koperasi Modern Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UKM Provinsi DKI Jakarta. *E-Coops-Day*, 5(2), 313–320.
- Wibowo, G. A., Awaluddin, A., Triyono, B., Surya, A., & Sukardi, S. (2024). Strategi Pengembangan Koperasi Mandiri sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *JIPM: Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 75–82.